

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) PENCURIAN
DAN PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ASMIR RESKianto

NIM: 10300112045

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Asmir Reskianto
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 01 September 1994
Nim : 10300112045
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : BTN Graha Kalegowa Blok E2 No. 19
Judul : Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan
Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan
Klas I Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 08 Februari 2017

Penulis,

ASMIR RESKianto
NIM: 10300112045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perbarengan Tindak Pidana *Concursus* Pencurian dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”, yang disusun oleh Asmir Reskianto, NIM: 10300112045, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 M, bertepatan dengan 6 Rabi’ul-Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 6 Desember 2016 M.
6 Rabi’ul-Awwal 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Pof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Alimuddin, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kurniati, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah s.w.t. Terima kasih atas nikmat Iman, nikmat Ilmu, nikmat kesehatan, dan nikmat kasih sayang. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. yang telah mengeluarkan manusia dari alam kebodohan menuju alam yang diridhai Allah s.w.t.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Cukup banyak tantangan penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini, namun berkat bimbingan, arahan dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang terkasih, ayahanda (Drs. Baso Padewakang) dan ibunda (Hj. St. Salmah, SE), sujud ananda atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian, semangat dan doa serta bantuan moral dan materil yang tak ternilai. Sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian, juga kepada kakakku (Ikha Purnamasari, SKM) dan adikku (Sri Wahyuni dan Isra Nurul Utama) yang senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. MusafirPababbari, M.SiselakuRektor UIN Alauddin Makassar, serta para wakilRektor, danseluruhstaf UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibunda Dra. Nila Sastrawati., M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Ibu Dr. Kurniati, S. Ag, M. Hi selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, dan Kak Canci selaku Staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi selaku pembimbing I dan IbuHj. Rahmiati, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan, mulai dari judul hingga selesainya skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu sejak masuk hingga taraf penyelesaian.
6. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan seluruh stafnya yang pernah penulis kunjungi yang telah memberikan fasilitas, tempat dan waktu bagi pelaksanaan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan GrasiHPK 012 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini. Kalian adalah yang terbaik.

Akhir kata semoga Allah s.w.t. memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas keilmuan menuju

terbentuknya sumber daya manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Gowa, 08 Februari 2017

Penulis

ASMIR RESKianto

NIM: 10300112045



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-48
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan	14
1. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	14
2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP	20
C. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	27
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	27
2. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) menurut KUHP	31
3. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) menurut Hukum	

Pidana Islam.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	49-53
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
G. Pengujian Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54-69
A. Faktor Pelaku melakukan Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) Pencurian dan Penganiayaan	54
1. Faktor Lingkungan	54
2. Faktor Pendidikan	57
3. Faktor Ekonomi.....	60
B. Upaya Lapas Klas I Makassar dalam Menanggulangi Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) Pencurian dan Penganiayaan.....	63
1. Gambaran Umum tentang Lapas Klas I Makassar.....	63
2. Visi dan Misi Lapas Klas I Makassar	64
3. Upaya Lapas dalam Menanggulangi Pelaku Perbarengan	

Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) Pencurian dan Penganiayaan	65
a. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.....	66
b. Pembinaan Keagamaan	67
BAB V PENUTUP.....	70-72
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	73-74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

ABSTRAK

Nama Penulis : Asmir Reskianto
Nim : 10300112045
Judul : **Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)**

Skripsi ini merupakan studi tentang perbarengan tindak pidana (*conkursus*) pencurian dan penganiayaan. Perbarengan tindak pidana (*conkursus*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi yaitu : faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*conkursus*) pencurian dan penganiayaan dan bagaimana upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam menanggulangi perbarengan tindak pidana (*conkursus*) pencurian dan penganiayaan.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis dengan pendekatan kriminologi dan sosio yuridis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder berupa pengumpulan data dari berbagai referensi seperti jurnal, buku-buku, dokumen, dan bahan bacaan lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan serta upaya lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Kemudian data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu analisa dengan kesimpulan bahwa sebab-sebab pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*conkursus*) pencurian dan penganiayaan yaitu factor lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun upaya lembaga pemasyarakatan klas I makassar dalam menanggulangi perbarengan tindak pidana (*conkursus*) yaitu dengan melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian berupa pemberian keterampilan dan pembinaan keagamaan dengan cara memberikan siraman rohani.

Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada masyarakat tentang sebab-sebab pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*conkursus*) pencurian dan penganiayaan sehingga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan mulai dari keluarga hingga ke masyarakat umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum. Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, namun undang-undang itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang di berlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.¹

Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Kajian hukum yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Di lihat dari sudut sumbernya², dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni (1) yang berasal dari undang-undang; dan (2) yang berasal dari luar undang-undang. Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang, dibedakan

¹Leden Marpauang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika), 2005), h. 115.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15.

lagi antara (a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut dasar peniadaan pidana umum; dan (b) yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus.

Masalah hukum sudah sangat banyak dikaji secara komprehensif termasuk salah satunya adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang tergolong sebagai satu tindak pidana maupun lebih dari satu. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman, ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan. Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.³

³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 27.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini dapat membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.⁴

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁵

Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concurus* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concurus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurus realis*), dan perbuatan berlanjut (*concurus handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu

⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, h. 42.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukumn Pidana 2*, h. 109

orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.⁶ Allah berfirman didalam al-Qur'an, yaitu QS. An Nahl (16) : 126 yaitu sebagai berikut :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.⁷

Cesare Beccaria Dalam bukunya "*dei delitti e delle pene*" ia secara gamblang menguraikan keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman, di dalam tulisan inilah tergambar delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman di jalankan dan prinsip tersebut adalah :

1. Perlunya di bentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim, penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan samata-mata karena undang-undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme).⁸

⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 134.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil quran, 2012, h. 281.

Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan kekuatan-kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor-faktor keluarga, agama dan sosio-kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan, apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Perbuatan pidana masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan pelanggaran yang disertai dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya. Ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63 berbunyi :

1. Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu, jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.
2. Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.⁹

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Cet. XIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 35-36

⁹R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha nasional, 1981), h. 78.

Deskripsi pasal di atas memperlihatkan bahwa jika perbuatan seseorang ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pasal dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut sistem absorpsi. Sistem ini mengajarkan bahwa pada prinsipnya pidana dikenakan kepada terdakwa delik perbarengan aturan adalah diambilkan dari satu jenis sanksi pidana yang ada dalam beberapa aturan hukum pidana yang dipandang telah dilanggar oleh terdakwa, terdapat tiga model untuk menentukan jenis sanksi yang mana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertama, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja. Kedua, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan. Ketiga, jika sanksi pidana terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tercantum di dalam ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah terdapat dalam hukum pidana khusus.

Bagi para penganut aliran bahwa kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa kriminalitas adalah akibat dari bakat atau sifat dasar si pelaku. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa sebuah kriminalitas merupakan bentuk ekspresi dari bakat. Teori Lombroso mengatakan bahwa sejak lahir penjahat sudah berbeda dengan manusia lainnya khususnya jika kita lihat dari ciri tubuhnya tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa ciri bukan penyebab kejahatan melainkan merupakan predisposisi kriminalitas.

Dari uraian di atas penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Perbarengan Tindak**

Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka pokok permasalahan yaitu Bagaimana Tinjauan Kriminologi terhadap Perbarengan Tindak Pidana “*conkursus*” Pencurian dan Penganiayaan adapun sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan Perbarengan Tindak Pidana (*conkursus*) Pencurian dan Penganiayaan ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dalam menanggulangi pelaku Perbarengan Tindak Pidana (*conkursus*) Pencurian dan Penganiayaan?

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting :

- a. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.¹⁰
- b. Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan itikad tidak baik.¹¹

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 2 h. 109

¹¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 83.

- c. Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).¹²

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, judul skripsi ini untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum*) pencurian dan penganiayaan.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian Pustaka ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menjelaskan tentang delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbarengan aturan (*concursum idealis*) di atur dalam pada pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) di atur dalam pasal 65 dan pasal 66 KUHP, dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) di atur dalam pasal 64 KUHP.¹³ namun dalam buku ini tidak menjelaskan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 KUHP.

¹²Kamus Bahasa Indonesia online. "Penganiayaan", *official website kamus Bahasa Indonesia online*. <http://kamusbahasaonline.org/Penganiayaan> (4 Mei 2016)

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana* h. 134-138.

2. Leden Marpaung dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* menjelaskan tentang adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang disebut ajaran yakni *concursum idealis* (*eendaadsche samenloop*), *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)¹⁴. Dalam buku ini juga menjelaskan ancaman pidana dan contoh pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidana concusus.
3. Teguh Prasetio dalam bukunya *Hukum Pidana* menjelaskan tentang KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI pasal 63-71. Dalam rumusan pasal maupun Bab IX, KUHP tidak memberikan definisi/pengertian perbarengan tindak pidana (*concursum*) ini.¹⁵ Namun buku ini tidak menjelaskan tentang sebab orang melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.
4. Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* menjelaskan tentang concursus menurut KUHP berbagai negara seperti polandia, yugoslavia, norwegia, korea, dan china.¹⁶ Tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan pengertian *concursum*, bentuk-bentuk *concursum* untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.
5. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan perbuatan dan penghitungan dalam pasal-pasal tentang *concursum* dalam KUHP seperti pasal 63, 64, 65, 66, 67, 70, dan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* h. 32.

¹⁵ Teguh Prasetio, *Hukum Pidana* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 179.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *sari Kuliah Perbandiangan Hukum Pidana*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121-130

71.¹⁷ Tetapi buku ini tidak menjelaskan pengertian *concurus* secara terperinci dan perbuatan apa saja yang termasuk dalam pasal tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbarengan tindak pidana (*concurus*) pencurian dan penganiayaan
- b. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dalam menanggulangi Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*) Pencurian dan Penganiayaan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum di bidang penyelesaian perkara dalam lembaga kota makassar dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perbarengan tindak pidana (*concurus*) pencurian dan penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi hukum yang berkompeten menangani masalah perbarengan tindak pidana (*concurus*) pencurian dan penganiayaan.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 140.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Berbagai teori tentang penyebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Teori-teori tersebut pada umumnya diupayakan untuk dapat menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Namun diakui bahwa belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum untuk menjawab pertanyaan seputar sebab-sebab kejahatan, namun para kriminolog dan ahli-ahli hukum terus menerus mengkaji berbagai teori yang ada dan perkembangannya ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar ilmu hukum atau berbagai pakar kriminolog, tergantung kondisi kehidupan masyarakat atau pelaku kejahatan pada saat itu.

W. M. W Noach mengemukakan bahwa faktor yang menjadi sebab kejahatan adalah lingkungan, namun para penganutnya berbeda dalam memandang faktor tersebut, khususnya dalam menjawab pertanyaan pengaruh-pengaruh lingkungan manakah yang penting bagi kriminologi, apakah keadaan ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kediaman ataukah lingkungan geografis. Dalam kajian lebih lanjut menurut Romi Atmasasmita memberikan teori yang dikenal dengan teori *differensial association*, yang pada intinya bahwa :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.

- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas aturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai
- e. Seorang menjadi *delinquent*, karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar dari pada menaatinya
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi *priority* dan *intensity*.
- g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun tingkah laku criminal merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku criminal tersebut tidak dapat karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹

Pendapat noach dan Romi mengenai penyebab kejahatan sebagaimana dikemukakan nampaknya lebih terkait dengan faktor lingkungan tempat kediaman, tempat pelaku mengadakan interaksi sosial. Pendapat ini memang mendapat banyak dukungan disamping kritikan bagi yang tidak setuju dengan pendapat ini dan beranggapan bahwa dalam keadaan lingkungan yang sangat tidak menguntungkan, selalu hanya sebagian dari manusia yang menjadi jahat, juga pihak lain dalam keadaan lingkungan yang sangat menguntungkan, selalu terdapat sejumlah orang yang tidak menjadi jahat.

Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi penyebab kejahatan, maka kemiskinan perekonomian dalam kehidupan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Kekawatiran mengenai keadaan

¹Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Remaja Karya, 1984), h. 35-37.

ekonomi (kemiskinan) sebagai penyebab kemiskinan dirumuskan oleh Plato yaitu kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mempunyai rasa rendah, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenang-senangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu negara, janganlah terdapat orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin²

Yang dikemukakan oleh plato tersebut memang dapat diterima jika hanya didasarkan pada penglihatan yang diperoleh dari kehidupan sekeliling tanpa mengajukan fakta-fakta ilmiah. Walaupun diakui bahwa kemiskinan dapat merupakan salah satu faktor terpenting sebagai pendorong dilakukannya kejahatan. Bahwa lingkungan sebagai penyebab kejahatan haruslah dipandang dalam konteks yang saling terkait dan tidak memisahkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, mengingat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi yang disebabkan oleh satu sebab melainkan oleh beberapa sebab.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kejahatan merupakan kejahatan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini membuat anak menjadi jahat. Dengan sendirinya orang tua gagal untuk menegakkan larangan-larangan untuk mencegah kejahatan, yang sebenarnya diharapkan dari setiap kehidupan keluarga.

Faktor lain yang turut pula mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan adalah pendidikannya, faktor pendidikan sangat berpengaruh baik tidaknya sifat manusia, Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, disekolah maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara ini, kita mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di

²Sahetapi J. E, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 12.

negara kita masih jauh dari kata layak. Kalau guru-guru menderita tekanan ekonomi, maka bisa diharapkan dapat mengajar dengan tekun.³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. E. Sahetapy bahwa tidak baiknya suatu pendidikan seringkali menyebabkan perbuatan jahat, orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu memberi contoh yang kurang baik akan menimbulkan sikap kejahatan pada anak.⁴

Dengan demikian makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula akhlak dan watak yang dimilikinya, sehingga mampu membedakan mana yang pantas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat selain itu masalah moralisasi perlu diberikan sejak dini, agar perilaku menyimpang dapat dicegah dan dikurangi dengan penghayatan ajaran-ajaran agama yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga.

B. Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan

1. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.⁵

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian.

³Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Cet I; Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. 108.

⁴Kusuma Mulyana, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1982), h. 37.

⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 127.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda sebagai berikut:

“Hij die eening goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort wegnaamt, met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt , als shuldning aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste Negen hondred gulden.”

Artinya:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.⁶

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362-367 KUHP yaitu:

a. Pencurian Biasa dalam Pasal 362 KUHP berbunyi :

Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Adapun unsur-unsur dalam aturan Pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur objektif dan subjektif, yaitu:

1) Unsur objektif

a) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu

⁶Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- (1) Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- (2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

b) Suatu barang/ benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis.

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Mengambil seekor kelinci yang ditembak orang lain merupakan pencurian. Dengan menembak mati seekor kelinci maka pemburu menjadi pemilik barang sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun, meskipun ia bukan satu-satunya orang yang dapat menembak mati kelinci itu. Rumput air yang melekat pada sebuah tanah seseorang, adalah kepunyaan orang yang mempunyai tanah itu.⁷

⁷R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (Cet.V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 222.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2) Unsur Subjektif

a) Dengan maksud

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang yang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian.⁸ Tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal ini. Namun apabila kemudian setelah orang itu sampai di rumah timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, padahal rencana sebelumnya akan diserahkan kepada polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya, sudah berada ditangannya.⁹

b) Memiliki untuk sendirinya

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 129.

⁹R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981), h. 377.

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Misalnya pelaku mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya meskipun untuk sementara waktu saja.¹⁰

b. Pencurian Berat dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan

¹⁰R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 223.

membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

b) Jika yang mencuri yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹¹

c. Pencurian Ringan dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Timbul pertanyaan, mengapa pencurian yang terjadi di dalam bus umum yang sedang berjalan yang banyak terjadi pada saat ini? tidak dimasukkan ke dalam unsur pasal ini, dan juga dalam hal ini para korban tidak mudah memperoleh bantuan dari orang lain

Secara logika bus umum atau kendaraan umum dapat dikategorikan suatu kendaraan umum yang berjalan di jalan umum dan untuk kepentingan umum. Dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan, arti kekerasan di sini adalah setiap perbuatan yang menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.¹²

¹¹R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, h. 377-378.

¹²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 132.

- b. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak dalam Pasal 366 KUHP yang berbunyi :

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

- c. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah-satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.¹³

2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja disebut penganiayaan. Tindak pidana ini menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tubuh manusia, maka diatur dalam KUHP tentang berbagai ketentuan terhadap perbuatan menyerang tubuh manusia. Perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan tersebut berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

¹³R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* h. 226-227.

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Secara umum kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam bab XX buku II, pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka¹⁴

Dalam KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian penganiayaan hanya disebutkan klasifikasinya saja. Untuk kata penganiayaan hanya menafsirkan dari kata arti katanya saja. Penganiayaan hanya diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh.

Sementara dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁵

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als omerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya

¹⁴Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta : PT Raja Garafindo Persada, 2001), h. 7.

¹⁵Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 70.

kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.¹⁶

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Membuat perasaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
4. Merusak kesehatan orang.¹⁷

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

¹⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 74-75.

¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* h. 10.

Yang termasuk pasal 351 dalam KUHP yang dirumuskannya sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus)
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- 3) Jika menyebabkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana¹⁸

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandelling*) yang dimuat dalam pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus)
- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.¹⁹

¹⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. XIII; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 150.

¹⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 150.

3. Penganiayaan Berencana

Di dalam KUHP mengatur tentang penganiayaan berencana dengan Pasal 353 yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.²⁰

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pembedaan.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²¹

²⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h.151.

Berdasarkan uraian pasal 354 KHUP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat yang merupakan tujuan utama dan bukanlah menjadi akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Artinya bahwa niat pelaku hanya menunjukkan pada luka berat saja kepada korban, apabila luka berat yang diderita korban menyebabkan suatu kematian yang bukanlah menjadi tujuan si pelaku, maka akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan untuk memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Berdasarkan uraian pasal 354 KUHP, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Kesalahannya: kesengajaan;
- c. Perbuatan : melukai berat;
- d. Objeknya, tubuh orang lain, dan
- e. Akibat: luka berat

Dalam penganiayaan berat, melihat dari niat awal pelaku harus ditujukan pada timbulnya luka. Akan tetapi luka berat itu hanyalah sebuah akibat yang dilakukan seorang pelaku terhadap korbannya, didalam undang-undang sendiri tidak memberikan batasan dari unsur luka berat, tetapi hanya mencantumkan suatu keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang dapat dikategorikan sebagai luka berat.²² Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah perlu melihat uraian dari rumusan pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :

²¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 152.

²²P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Citra Grafika, 2010), h. 36.

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih, dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²³

Pada pasal 90 KUHP diatas telah merumuskan keadaan yang dapat dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat melainkan faktor atau alasan memperberat pidana pada penganiayaan berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP, penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana dalam pasal 355 KUHP, oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya atau terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.²⁴

Menurut ketentuan pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana dirumuskan sebagai berikut :

²³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 44 - 45.

²⁴P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 38.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁵

Berdasarkan rumusan pasal 355 KUHP diatas terlihat, bahwa penganiayaan berat berencana terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku sekaligus direncanakan.
- b. Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki si pelaku, melainkan kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan, sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan.²⁶

C. Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*)

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak

²⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 151.

²⁶P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 39-40.

pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.²⁷ (Belanda: *samenloop*; latin: *concursum*)

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloo van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *sameloo van strafbare feiten* atau bahasa jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau *feit* (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja.(Utrecht:141). Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.²⁸

Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*Concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. ada empat macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu :

1. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut.

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109.

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 134,

Menurut pasal 63 ayat (1), jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Jika orang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka terhadapnya hanya dikenakan salah satu saja dari ketentuan –ketentuan tersebut. Jika di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan mengenai jenis pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a KUHPid), maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Menurut pasal ini, jika diantara ketentuan itu ada yang merupakan ketentuan pidana yang umum dan ketentuan pidana yang khusus, maka hanya diterapkan ketentuan pidana yang khusus.

Menurut pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam perbuatan berlanjut, hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja. Jika ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a) maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Cara ini diterapkan untuk perbarengan perbuatan dalam kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a) yang sejenis. Untuk beberapa kejahatan itu hanya dikenakan satu pidana saja, yang maksimumnya yaitu jumlah maksimum yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPid).

3. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Menurut pasal 66 ayat (1), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a) yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Jika ada perbarengan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap kejahatan (kumulasi) tetapi jumlah maksimumnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, ini berarti ada kumulasi pidana tetapi diperlunak (diperingan).

4. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen*)

Menurut pasal 70 ayat (1), jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun

pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.²⁹

2. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) menurut KUHP

Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai *concursus*, namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya diperoleh pengertian sebagai berikut;

Di dalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari :

1. Perbarengan Peraturan (*concursus idealis*): pasal 63 yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.³⁰

Menurut ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat, misalnya perkosaan dijalan umum, melanggar pasal 285 (12 tahun penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun.

Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling berat.

²⁹Maramis Frans, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 227-229

³⁰R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA* (Cet. V ; Jakarta PT. Raja Garfindo Persada, 2005,) h. 58.

Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 10). Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.

Dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1 dalam hal ini berlaku *adagium* “*lex specialis derogat legi generali*”. Misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah terdapat dalam pasal 341 (*lex specialis*) yaitu 7 tahun penjara.

2. Perbuatan Berlanjut (*delictum Continuum/Vortgezette handeling*): pasal 64 yang berbunyi :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang di palsu atau yang di rusak itu.
- (3) Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,-

maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362,373,378 dan 406.³¹

Menurut pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

Ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan/mengedarkan mata uang yang palsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai *concursum realis*, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dikenakan ialah 15 tahun penjara.

Ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407:1 (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih Rp. 250,- maka menurut pasal 64 ayat 3 dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (pengrusakan barang). Misal: A melakukan 3 kali penipuan ringan (379) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,- terhadap A bukannya dikenakan pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara, tetapi dikenakan pasal 378 yang maksimumnya adalah 4 tahun penjara.

³¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 59-60.

3. Perbarengan Perbuatan (*concursum Realis*) pasal 65 s/d 71. Pasal 65 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.³²

Misal : A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara. Jadi disini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam.

A melakukan dua jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya 9 tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun = 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.

Pasal 66 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi

³²R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 61.

jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.³³

Misanya :

1. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah $(1/3 \times 2)$ tahun 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi yang dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan ditambah 2 tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.
2. Bagaimanakah dalam hal A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 1.000,-?

Mengenai hal ini ada dua pendapat :

- a) Menurut Noyon semuanya harus dijatuhkan yaitu 6 bulan penjara dan denda Rp. 1000,-. Menurut Blok perhitungannya sbb: pidana denda dijadikan dulu pidana kurungan pengganti yaitu maksimum 6 bulan (lihat pasal 30 KUHP). Dengan demikian maksimumnya ialah $6 + (1/3 \times 6)$ bulan = 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan maka 8 bulan ini dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan $1/3 \times \text{Rp. 1000,-} = \text{Rp. 333,30}$ (atau dibulatkan menjadi Rp. 334,-).

³³R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 62.

Catatan :

Perhitungan Blok mengenai jumlah pidana kurungan pengganti diatas, masih didasarkan pada perhitungan lama sebelum adanya perubahan denda 15 kali menurut UU No. 18 Prp. 1960.

- b) Menurut perhitungan lama, tiap denda 50 sen atau kurang dihitung sama dengan satu kurungan pengganti, tetapi karena menurut pasal 30 (3) maksimum kurungan pengganti 6 bulan, maka untuk denda Rp. 1000,- maksimum kurungan penggantinya tetap 6 bulan. Dengan telah adanya perubahan pidana denda, maka 1 hari kurungan pengganti dihitung sama dengan Rp. 7,50 (yaitu 50 sen dikalikan 15). Jadi untuk denda Rp. 1000,- kurungan penggantinya sama dengan 134 hari (dibulatkan).

Dengan demikian apabila diikuti perhitungan menurut blok diatas, maka maksimum 8 bulan dapat dipecah misalnya menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan denda 60 per 134 x Rp. 1000,- Rp. 447,76.

3. Bagaimanakah dalam hal A melakukan dua jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351 (diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp. 4.500,- dan pasal 360 (diancam pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan)?

Dalam hal ini hakim harus mengadakan “pilihan hukum” terlebih dahulu

- a. Kalau dipilih ancaman pidana yang sejenis, maka digunakan sistem absorpsi yang dipertajam/deperberat (pasal 65).

Dalam contoh di atas maka maksimum yang dapat dijatuhkan ialah : 5 tahun + $(1/3 \times 5)$ tahun = 6 tahun 8 bulan penjara.

- b. Kalau dipilih ancaman pidana yang tidak sejenis, maka digunakan sistem kumulasi yang diperlunak/diperingan (pasal 66).

Misal dalam contoh diatas :

Untuk pasal 351 dipilih pidana penjara (2 tahun 8 bulan) untuk pasal 360 dipilih pidana kurungan (1 tahun). Maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan (2 tahun 8 bulan) + $(1/3 \times 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}) = 3 \text{ tahun } 6 \text{ bulan } 20 \text{ hari}$. Kalau yang dipilih adalah pidana denda (untuk pasal 351) dan pidana penjara (untuk pasal 360), maka perhitungannya seperti nomor 2 diatas.³⁴

Pasal 67 yang berbunyi :

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.³⁵

Misalnya : hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

Pasal 68 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 65 dan 66 tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut :

Ke-1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja,

³⁴ Amir Ilyas, *et al.*, *Asas-Asas Hukum Pidana II* (Cet. I; Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 150-152

³⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 63.

maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

Ke-2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;

Ke-3. Pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) Kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.³⁶

Misalnya : Jika hakim untuk lebih dari satu peristiwa pidana akan menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya kepada seseorang yang pada suatu waktu dituduh melakukan beberapa tindak pidana, misalnya hak untuk masuk pada kekuasaan bersenjata tersebut dalam pasal 35 (1) sub2, maka pencabutan itu dilakukan selama waktu lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Akan tetapi jika yang akan dijatuhkan sebagai hukuman tambahan itu pencabutan beberapa hak-hak yang tidak sama jenisnya, misalnya hak untuk masuk pada kekuasaan bersenjata (ps. 35 (I) sub 2) dan hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu (ps. 35 (I) sub 6), maka pencabutan hak-hak ini masing-masing dilakukan bagi tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan dengan tidak dikurangi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38. Demikian pula jika akan dijatuhkan hukuman tambahan perampasan barang-barang yang tertentu, dan hukuman kurungan pengganti bila barang-barang itu tidak diserahkan (ps. 41), maka hukuman-hukuman tambahan ini masing-masing

³⁶R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 64.

dijatuhkan bagi tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, dengan tidak dikurangi, dengan pengertian bahwa jumlah hukuman kurungan pengganti ini lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.³⁷

Pasal 69 yang berbunyi :

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.
- (2) Jika hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, dalam perbandingan, hanya terberatlah yang dipakai.
- (3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- (4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.³⁸

Misalnya hukuman pokok sejenis yaitu hukuman penjara dengan hukuman penjara, hukuman kurungan dengan hukuman kurungan, hukuman denda dengan hukuman denda. Perbandingan beratnya antara hukuman-hukuman tersebut (tidak sejenis) ditentukan menurut susunan dalam pasal 10, jadi yang terberat ialah hukuman mati lalu hukuman penjara, kemudian hukuman kurungan dan yang teringan hukuman denda. Ancaman hukuman penjara atau denda itu lebih berat dari pada ancaman hukuman kurungan atau denda.

Hukuman yang tidak sejenis misalnya kejahatan yang diancam hukuman penjara sedang kejahatan yang lain diancam hukuman kurungan, atau yang satu hukuman penjara dan yang lain hukuman denda, atau lagi yang satu hukuman

³⁷R. Susilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), h. 84

³⁸R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 65.

kurungan sedang yang lain hukuman denda. Perbandingan beratnya hukuman yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya, misalnya ancaman hukuman penjara 10 tahun lebih berat dari pada ancaman hukuman penjara 8 tahun, atau ancaman hukuman kurungan maksimum 6 bulan itu lebih berat dari pada ancaman hukuman maksimum 4 bulan, atau ancaman hukuman denda maksimum 500 rupiah itu lebih berat dari pada ancaman hukuman denda maksimum 300 rupiah dan seterusnya. Perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya ancaman hukuman kurungan maksimum 6 bulan itu, meskipun suatu hukuman kurungan lebih berat dari pada ancaman hukuman penjara maksimum 3 bulan.³⁹

Pasal 70 yang berbunyi :

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun perbarengan dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti, paling banyak adalah delapan bulan.⁴⁰

Misal A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah (6+9) bulan = 15 bulan, namun menurut pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi misalnya A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 9 bulan, maka

³⁹R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 84-85.

⁴⁰R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 63-64.

maksimum pidana kurungan yang dapat dijatuhkan bukanlah (9+9) bulan = 18 bulan, tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.⁴¹

Pasal 70 bis yang berbunyi :

Dalam menggunakan pasal 65,66, dan 70, kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran; tetapi dengan pengertian bahwa, jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan itu, jumlahnya paling banyak adalah delapan bulan.⁴²

Misalnya : A melakukan pencurian ringan (pasal 364) dan penggelapan ringan (pasal 373) yang masing-masing diancam pidana 3 bulan penjara. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan penjara (sistem kumulasi), tetapi apabila A misalnya melakukan kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan, maka maksimumnya bukan 9 bulan penjara (kumulasi) tetapi 8 bulan penjara.

Pasal 71 yang berbunyi :

Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada keputusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.⁴³

Misalnya : A melakukan kejahatan sebagai berikut :

1)Tgl. 1/1 : pencurian (pasal 362, ancaman pidana 5 tahun penjara);

⁴¹Amir Ilyas, *et al.*, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, h. 152.

⁴²R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 64.

⁴³R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 66.

- 2)Tgl. 5/1 : penganiayaan biasa (pasal 351; diancam 2 tahun 8 bulan);
- 3)Tgl. 10/1 : penadahan (pasal 480, diancam 4 tahun penjara);
- 4)Tgl. 20/1 : penipuan (pasal 374, diancam 4 tahun penjara).

Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu keputusan. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Andaikata untuk keempat tindak pidana itu, hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, maka jika kemudian ternyata A pada tanggal 14/1 (jadi sebelum ada keputusan) melakukan penggelapan (pasal 372 yang diancam pidana penjara 4 tahun), maka keputusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 8 bulan penjara dan dengan demikian dirumuskan secara singkat Putusan ke II = (putusan sekaligus)-(putusan ke I).⁴⁴

3. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) menurut Hukum Pidana Islam

Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam jarimah, dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan terakhir, Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan, contohnya seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya, dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.⁴⁵ Allah berfirman didalam al-Qur'an, yaitu QS. Al An'am (6) : 160 yaitu sebagai berikut :

⁴⁴ Amir Ilyas, *et al.*, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, h. 153-154.

⁴⁵ Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 166.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Barang siapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).⁴⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالْذَّجَالِ وَالْذُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخَوِصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمَرَ الْعَامَّةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ وَأَمَرَ الْعَامَّةَ قَالَ وَأَمَرَ السَّاعَةَ⁴⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad dan 'Affan mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Al Hasan dari Ziyad bin Riyah dari Abu Hurairah, dia berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Bersegeralah beramal baik sebelum datang enam hal yaitu; terbitnya matahari dari barat, Dajjal, asap (menjelang kiamat), binatang tunggangan (dari perut bumi), dan kematian salah seorang dari kalian serta kehancuran total."

Gabungan jarimah nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing jarimah bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri, contohnya tukang becak yang dengan kakinya melukai seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati, dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan.⁴⁸ Allah berfirman di dalam al-Qur'an, yaitu QS. Yunus/10: 27 yaitu sebagai berikut:

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil quran, 2012), h. 150.

⁴⁷Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. XIV (Cet. I; t.t.: Muassah al-Risalah, 1421 H/2001 M.), h. 56.

⁴⁸Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 167.

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) Balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

Seharusnya pelaku pada gabungan jarimah tidak dijatuhi hukuman atas semua jarimah yang dilakukannya, meskipun gabungan jarimah tersebut menunjukkan jiwa kejahatannya, hal ini oleh karena ia mengulangi suatu perbuatan jarimah, ia belum mendapat hukuman pengajaran dari jarimah sebelumnya. Allah berfirman didalam al-Qur'an, yaitu QS. Asy-Syura (42) : 40 yaitu sebagai berikut :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Terjemahnya :

Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.⁵⁰

Dalam hukum positif terdapat tiga teori mengenai gabungan jarimah ini antara lain :

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 212.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 487.

1. Teori berganda

Menurut teori ini pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap jarimah yang dilakukannya. Kelemahan teori ini terletak pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung-gabungkan maka akan berubah menjadi hukuman seumur hidup.

2. Teori penyerapan

Menurut teori ini hukuman yang lebih berat dapat menyerap (menghapuskan) hukuman yang lebih ringan. Kelemahan teori ini adalah kurangnya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan banyaknya jarimah yang dilakukan, sehingga terkesan hukuman demikian ringan.

3. Teori campuran

Teori ini merupakan campuran antara berganda dan penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua teori tersebut. Menurut teori campuran hukuman-hukuman bisa digabungkan, asal hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu, sehingga dengan demikian akan hilanglah kesan berlebihan dalam penjatuhan hukuman.⁵¹

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*Tadakhul*) dan penyerapan (*Al-Jabb*).

1. Teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*)

Menurut teori tadakhul, ketika menjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya

⁵¹Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 167.

semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yaitu :

1. Meskipun jarimah yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.
2. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang yang makan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan dan kepentingan perseorangan dan juga masyarakat.⁵²

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori tadakhul ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama, seperti qadzaf dan minum minuman keras. Pedoman mereka dalam menerapkan teori tadakhul ini adalah melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau hukumannya sejenis. Oleh karenanya, apabila hukuman-hukuman dari jarimah yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa, sehingga semua hukuman dijatuhkan.⁵³

2. Teori Penyerapan (*Al-Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati,

⁵² Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 168.

⁵³ Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para fuqaha, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menggunakan teori ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat sampai di mana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua jenis jarimah atau tidak.⁵⁴

Menurut imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai had atau qiahash maka hukuman had tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman had qadzaf. Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman hudud (yang merupakan hak Allah) berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, di mana salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman had yang lain diserap oleh hukuman mati.⁵⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan dalam hukuman (antara hak Allah dan hak manusia) maka hak manusialah yang harus didahulukan. Kalau sesudah dilaksanakannya hukuman tersebut, hak Allah (hukuman hudud) tidak bisa dijalankan lagi maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan, dan hukuman yang merupakan hak Allah itu lebih dari satu maka cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan, yaitu hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain. Sebenarnya

⁵⁴Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

⁵⁵Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Ahmad.⁵⁶

Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.⁵⁷

Sebagian ulama Syafi'iyah tampaknya ada yang menggunakan teori penyerapan ini, akan tetapi sebenarnya mereka tidak menggunakannya melainkan menggunakan teori saling memasuki. Misalnya dalam tindak pidana pencurian dan perampokan. Dalam kasus ini mereka tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena telah cukup dengan hukuman mati yang merupakan hukuman untuk perampokan. Mereka memasukkan perampokan sebagai pencurian berat, sedangkan pencurian tersebut sebagai pencurian ringan.⁵⁸

Dari kedua teori yaitu teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*) dan teori penyerapan (*Al-Jabb*) di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak hamba, dan gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak hamba murni.

⁵⁶Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

⁵⁷Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169-170.

⁵⁸Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 170.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian : Jenis Penelitian yang digunakan yaitu *Field Research Kualitatif*. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran.
2. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. Lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kriminologi

Pendekatan Kriminologi adalah suatu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada sebab-musabab atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum*) pencurian dan penganiayaan.

2. Pendekatan Sosio Yuridis

Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

C. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mengumpulkan data, maka dilakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Dalam hal ini yakni narapidana Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*) Pencurian dan Penganiayaan serta Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar bagian Pembinaan.

2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.¹

¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2011), h. 186.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

- b. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

- c. Kamera

Alat ini digunakan untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

- d. Tape recorder

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelohan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Klasifikasi data* adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
 - b. *Reduksi data* adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
 - c. *Koding data* adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
 - d. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, kemudian ditabulasi dengan tabel frekuensi dengan rumus statistik sederhana.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat ilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektifitas. Artinya bahwa suatu penelitian bila

telah memenuhi standar objektivitas, maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kreadibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya, triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pelaku melakukan Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar faktor penyebab pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus*) yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Kejahatan dilakukan oleh orang jahat, penjelasan ini barangkali memuaskan dalam keadaan suatu masyarakat yang masih sangat sederhana. Ia menjadi tidak memuaskan lagi, manakala masyarakat sudah menjadi semakin besar wilayahnya dan kompleks keadaannya. Dalam hal ini rasanya adalah lebih tepat, apabila kita membicarakannya sebagai suatu penyakit sosial. Perabot yang dipakai menganalisa dan menjelaskan dengan sendirinya juga mengalami perubahan. Kejahatan lalu dikaitkan kepada lingkungan sosial, kepada dampak proses-proses dalam masyarakat terhadap individu serta kelompok dan seterusnya.

Dalam kajian lebih lanjut menurut Romi Atmasasmita memberikan teori yang dikenal dengan teori *differensial association*, yang pada intinya bahwa :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.

- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas aturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai
- e. Seorang menjadi *delinquent*, karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar dari pada menaatinya
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi *priority* dan *intensity*.
- g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun tingkah laku criminal merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku criminal tersebut tidak dapat karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹

Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan, bahwa proses dimana seseorang bertindak laku tertentu berdasarkan pada:

- a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam suatu proses perhubungan (komunikasi).
- b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.
- c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran itu meliputi: cara melakukan kejahatan, baik yang sukar maupun yang sederhana

¹Dirdjosworo Soedjono, *Pengantar Penelitian kriminolog* (Jakarta: Remaja Karya, 1984), h. 35-37.

serta motif, fikiran-fikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik.

- d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan dapat bervariasi atau berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut tergantung pula pada frekuensi (keseringan), durasi, priority (masa lampau) dan intensitas.
- e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal secara bervariasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi di dalamnya sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu.

Dalam arti, kesempatan terbuka untuk melakukan kejahatan, aliran ini dipelopori oleh Lacassagne yang dikutip oleh W.A Bonger yang mengemukakan bahwa kejahatan ini diumpamakan sebagai bakteri dimana keadaan sekeliling kita adalah wabah dari pembenihan penjahat.

Jadi disini diidentifikasi bakteri sebagai penjahat dan tubuh manusia dengan masyarakat, jika tubuh manusia lemah, maka bakteri akan berkembang dengan subur sekali, demikian pula jika masyarakat lemah, maka kelemahan itu akan membuka kesempatan untuk berkembangnya kejahatan.

Pendapat atau teori tentang pengaruh lingkungan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan pelaku perbarengan tindak pidana (*concursum*) pencurian dan penganiayaan atas nama Ahmad Diandis Bin Dg. Sikki yang berumur 15 tahun yang beralamat jl. Toddopuli 1 makassar, berikut kutipan wawancara peneliti dengan AD :

Peneliti : faktor apa yang membuat saudara melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan?

AD : dari pergaulan ikut sama teman-temanku

Kutipan wawancara 1

Adapun kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh AD adalah melakukan Pencurian dengan cara menganiaya pada malam hari yaitu pelaku memaksa pengendara motor yang sedang melintas ketika motor itu berhenti pelaku langsung menodongkan sebilah badik/parang dan busur ke arah korban dan apabila keinginan pelaku tidak terpenuhi maka pelaku tidak segan-segan melukai Korban dengan cara memarangi si korban kemudian kabur. Pelaku biasanya beroperasi di Area Pettarani dan Perintis, dengan sasaran pencurian pada Kost-kostan dan barang yang menjadi sasaran seperti Hp dan Laptop serta Uang tunai, Kemudian barang dari hasil pencurian tersebut kemudian di jual ke teman atau *counter* terdekat.² Dari keterangan pelaku bahwa kondisi teman-teman pergaulannya sangat jauh dari pergaulan yang baik, seperti yang diungkap pelaku bahwa teman-temannya cenderung melakukan pencurian dan penganiayaan dengan sasaran perempuan, kemudian mabuk-mabukan dan perjudian sampai begadang hingga petang. Dengan kondisi seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan seperti itu adalah termasuk pergaulan yang tidak wajar dalam lingkungan yang tidak baik.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, disekolah maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara ini, kita mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di negara kita masih jauh dari kata layak. Kalau guru-guru menderita tekanan ekonomi, maka bisa diharapkan dapat mengajar dengan tekun.³

²Ahmad Diandis Bin. Dg. Sikki (15 Tahun), narapidana Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dengan Penganiayaan, wawancara oleh penulis, 16 September 2016.

³Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Cet I; Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. 108.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. E. Sahetapy bahwa tidak baiknya suatu pendidikan seringkali menyebabkan perbuatan jahat, orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu memberi contoh yang kurang baik akan menimbulkan sikap kejahatan pada anak.⁴

Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan ilmu pengetahuan salah satunya yaitu tingkat pendidikan, seseorang dapat melakukan tindak pidana, karena pelaku tindak pidana hanya lulusan SD, SMP, bahkan banyak yang buta huruf. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan, karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaan, karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tidak pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

Faktor pengangguran bisa beragam macamnya, dan ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah, usaha mengatasi pengangguran bukanlah kewajiban pemerintah semata, tetapi seluruh penduduk indonesia diharapkan partisipasinya untuk mengatasi masalah ini, tanpa kerja sama pemerintah dan masyarakat mustahil dapat mengatasi pengangguran di indonesia. Berikut adalah beberapa penyebab pengangguran yang umum terjadi di indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dikarenakan semua perusahaan membutuhkan pegawai seminimal SMA.

⁴Kusuma Mulyana, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan* (Bogor: Galia Indonesia, 1982), h. 37.

- b. Kurangnya keterampilan. Banyak mahasiswa atau lulusan SMA yang sudah mempunyai kriteria dalam bekerja, namun dalam teknisnya keterampilannya masih kurang. Sehingga susah dalam mencari pekerjaan.
- c. Kurangnya lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya, Indonesia memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi, jumlah yang sangat besar ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
- d. Kurangnya tingkat EQ masyarakat. Tingkat EQ meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, yang berpengaruh terhadap keterampilan berbicara/komunikasi, sosialisasi, kepercayaan diri, dan sifat lainnya yang mendukung dalam hidup di masyarakat, orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang selalu pendiam dan tidak berani mengeksplor potensi diri.
- e. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain, misalnya ada seorang lulusan sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah, ia termasuk pengangguran, selain itu ia melewatkan peluang untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi orang lain.
- f. Tidak mau berwirausaha. Umumnya seorang yang baru lulusan sekolah/kuliah terpaku dalam mencari pekerjaan seolah itu adalah tujuan yang sangat mutlak, sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan membuat suatu usaha.⁵

⁵Dimasjoe10 "faktor Masalah Pengangguran dan Cara Mengatasinya," Blog Dimas. <https://dimasjoe10.wordpress.com/2013/01/14/faktor-masalah-pengangguran-dan-cara-mengatasinya/> (21 September 2016).

Teori tentang pengaruh pendidikan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pelaku perbarengan tindak pidana (*concursum*) pencurian dan penganiayaan atas nama Fahrur umur 15 tahun yang beralamat di mannuruki 2 lorong 7B No. 7, Berikut kutipan wawancara peneliti dengan fahrur:

Peneliti : faktor apa yang membuat saudara melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan?
 Fahrur : tidak tamatka SD, mau cari kerja tidak tidak tauka membaca, dibodoh –bodokija nanti.

Kutipan Wawancara 2

Dengan kronologitindak pidana pencurian di area Mannuruki 2 dengan sasaran kejahatan Kost-kosan Wanita, barang yang pernah dicuri pelaku berupa Barang-barang berharga seperti Hand phone, Laptop, dan Uang tunai, kemudian barang dari hasilkejahatantersebutdijualketeman-temannya. Pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dengan cara mengancam si korban dengan sebilah pisau/badik kearah lehersi korban.⁶ Dengan melihat status pendidikannya yang tidak tamat SD yang jelas memiliki pengetahuan yang sangat minim, sehingga perbuatan si pelaku itu tanpa melalui pertimbangan yang matang. Oleh karena itu pendidikan jelas memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku seseorang.

3. Faktor Ekonomi

Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi penyebab kejahatan, maka kemiskinan perekonomian dalam kehidupan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Kekawatiran mengenai keadaan ekonomi (kemiskinan) sebagai penyebab kemiskinan dirumuskan oleh Plato yaitu kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mempunyai rasa rendah,

⁶Fahrul (15 Tahun), Narapida Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum*) Pencurian dan Penganiayaan, wawancara penulis 16 September 2016.

sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenang-senangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu negara, janganlah terdapat orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin⁷

Yang dikemukakan oleh plato tersebut memang dapat diterima jika hanya didasarkan pada penglihatan yang diperoleh dari kehidupan sekeliling tanpa mengajukan fakta-fakta ilmiah. Walaupun diakui bahwa kemiskinan dapat merupakan salah satu faktor terpenting sebagai pendorong dilakukannya kejahatan. Bahwa lingkungan sebagai penyebab kejahatan haruslah dipandang dalam konteks yang saling terkait dan tidak memisahkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, mengingat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi yang disebabkan oleh satu sebab melainkan oleh beberapa sebab.

Anak terlantar sangat erat hubungannya dengan keadaan ekonomi keluarganya, keluarga yang miskin sekali bisa menyebabkan anak-anak terlantar, demikian juga keluarga yang sangat kaya raya bisa menyebabkan pendidikan anaknya terlantar, karena mereka terlalu banyak mencurahkan perhatian pada kekayaan dan usahanya, teman yang dahulu sejajar kedudukannya, merasa dirinya lebih tinggi, sedangkan untuk bergaul dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggi tingkatnya merasa canggung, perasaan yang serba susah tidak menentu inilah yang menimbulkan konflik-konflik yang dapat menjadi musabab kejahatan. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemunduran hartanya orang menjadi serakah dan dalam kelupaan, orang berbuat kejahatan yang bukan semestinya.⁸

Sesuai teori pengaruh ekonomi tersebut maka sejalan dengan hasil wawancara dengan Andri Rajab Bin Abd Rajab Dg. Lewa beralamat di dusun

⁷Sahetapi J. E, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 12.

⁸Noach, Simandjuntak. B dan Pasaribu. I. L, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), h. 55.

Gusung desa Taeng kecamatan Pallangga kabupaten Gowa, berikut kutipan wawancara peneliti dengan AR :

Peneliti : faktor apa yang membuat saudara melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan?

AR : untuk makan sehari-hari makan istri dan anakku

Kutipan Wawancara 3

Dengan kronologis melakukan pencurian dan menganiaya disekitar jalan Baddoka dan jl. Tol reformasi dengan menggunakan busur panah, sasaran kejahatan pengendara sepeda motor wanita, AR pun tak segan-segan membusur si korban apabila keinginannya tidak terpenuhi dan barang yang pernah diambil dari hasil kejahatan tersebut berupa handphone dan di jual kepada ke temannya maupun *Counter* handphone dan uangnya itu digunakan menghidupi istri dan anaknya.⁹ Dengan melihat alasan pelaku melakukan tindak pidana yang dipengaruhi masalah ekonomi bahkan tidak mempunyai pekerjaan, maka berpengaruh terhadap pola hidup seseorang karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf perekonomian yang lemah pada masyarakat.

Tabel I

NO	JENIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)	TAHUN	JUMLAH
1.	Pencurian dan penganiayaan	2015	5
2.	pencurian dan penganiayaan	2016	4

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar tahun 2015-2016

Setelah melihat tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidana anak yang ada di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar yang melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan dalam setahun terakhir

⁹Andri Rajab Bin Abd. Rajab Dg. Lewa (17 Tahun), narapidana Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan, wawancara oleh penulis, 16 September 2016.

mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 5 orang dan tahun 2016 sebanyak 4 orang.

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam Menanggulangi Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan

1. Gambaran Umum Tentang Lapas Klas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar berdiri diatas tanah seluas 94.069 m². Bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi yang terakhir 2007 yakni penambahan gedung kantor bagian depan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi Selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis *substantif* maupun *administrative*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar.

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Adapun pembagian ruangan yang terdapat didalam Lapas Klas I Makassar antara lain :

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
- b. Ruang Kantor bersantai

- c. Ruang Aula serbaguna
- d. Ruang kunjungan, pembinaan, dan keamanan
- e. Blok penghuni terdiri dari 9 blok (daya tampung 740 orang) :
 - 1. Tempat hunian bagi narapidana umum dan tahanan meliputi blok :
 - a) Akasia
 - b) Beringin
 - c) Cendawa
 - d) Damar
 - e) Ebony
 - f) Flamboyan (Blok Pengasingan)
 - g) Gaharu
 - 2. Tempat hunian tahanan anak meliputi blok :
 - a) Hawaii
 - 3. Tempat hunian untuk tahanan korupsi meliputi blok :
 - a) Intan
- f. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja)
- g. Ruang Poliklinik
- h. Rumah Sakit
- i. Ruang Keterampilan Kerja
- j. Pos jaga atas 6 unit
- k. Ruang Dapur dan Gudang
- l. Ruang Sarana Olahraga
- m. Rumah Dinas Pegawai

2. Visi dan Misi Lapas Klas I Makassar

Lapas Klas I makassar memiliki Visi : Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki

kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan diiringi Misi :

1. Perlindungan Hak Asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak didik
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis Teknologi
4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib
5. Mewujudkan kepastian hukum WBP

Itu semua pada dasarnya demi mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui asimilasi dan integrasi, semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya over kapasitas.

3. Upaya Lapas Klas 1 Makassar dalam Menanggulangi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan

Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pengadilan para terpidana selanjutnya akan menjalani masa hukuman atau masa pembedaannya yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula akan dilakukan pembinaan oleh pihak lapas. Pada prinsipnya Lapas sebagai wadah atau tempat dilakukannya pembinaan untuk

menghilangkan sifat jahat agar terpidana itu bisa sadar dan tidak mengulangi kejahatannya serta dapat diterima kembali di masyarakat.

Pembinaan berfungsi meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Upaya dan usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap narapidana sesuai untuk mengetahui cepat atau lambatnya pembinaan untuk memperbaiki sikap terpidana. secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan ketetapan Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

a. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana. Pembinaan kepribadian diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab

atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk menghindari untuk melakukan kejahatan lagi.

Dan pembinaan kemandirian sebagai bekal narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya. Mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses bersosialisasi.

b. Pembinaan Keagamaan

Dalam sebuah kehidupan manusia perlu adanya pedoman agama yang akan menentukan jalan hidupnya. Agama merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun pada hal-hal yang positif. Fenomena yang terjadi sekarang ini banyaknya manusia yang tidak lagi menerapkan nilai agama dalam kehidupannya sehingga menimbulkan ketidak tentraman dan ketidak nyamanan bagi masyarakat.

Banyak beranggapan bahwa narapidana adalah orang yang jahat, yang rendah yang telah melakukan kesalahan dan tidak bisa berubah menjadi manusia yang baik yang bisa bermanfaat terhadap manusia. Pada dasarnya narapidana ialah orang yang melakukan pelanggaran, tersesat jalan hidupnya yang perlu diarahkan kembali jalan hidupnya pada jalan yang benar salah satunya yaitu dengan pembinaan agama. Dengan pembinaan keagamaan terhadap narapidana dapat

menumbuhkan kesadaran diri menuju kehidupan yang tentram dan damai serta berguna bagi diri sendiri lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan teori tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pembinaan keagamaan tersebut, maka sejalan dengan hasil dari wawancara dengan Pegawai Lapas Klas 1 Makassar Bagian Pembinaan Ibu Lely

Mareyke Pajouw, A.Md.IP. S.Sos, M.Si. dan berikut kutipan wawancaranya:

Peneliti : Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam menanggulangi perbarengan tindak pidana (*Concursus*) pencurian dan penganiayaan?

Lely mareyke : Dengan melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian berupa pemberian keterampilan seperti membuat kerajinan tangan berupa bingkai foto serta membuat asbak dan pembinaan keagamaan dengan cara memberikan siraman rohani agar tidak ada pengulangan tindak pidana dari pelaku setelah bebas dalam menjalani masa hukuman.¹⁰

Kutipan wawancara 4

Selain pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pembinaan keagamaan, lanjut hasil wawancara dengan ibu lely mareyke pajouw mengenai perbedaan pembinaan narapidana perbarengan tindak pidana (*concursus*) dengan narapidana lainnya di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar, dan berikut kutipan wawancaranya :

Peneliti : apa perbedaan pembinaan antara narapidana *concursus* dengan narapidana yang lainnya?

Lely mareyke : di lapas klas 1 makassar untuk pola pembinaan antara narapidana *concursus* dengan narapidana perkara pidana lain tidak ada perbedaan karena terbatasnya tenaga petugas lapas yang melaksanakan pembinaan di dalam lapas dan kami mendapat bantuan dari pihak luar dalam hal pembinaan kepribadian.¹¹

Kutipan Wawancara 5

Lanjut hasil wawancara dengan Staf Bimkemas (bimbingan kemasyarakatan Bapak Andi Muh. Hamka, SH.i, MH mengenai tingkat

¹⁰Lely Mareyke Pajouw, Pegawai Lapas Klas 1 Makassar Bagian Pembinaan, wawancara oleh penulis, 16 September 2016.

¹¹Lely Mareyke Pajouw, Pegawai Lapas Klas 1 Makassar Bagian Pembinaan, wawancara oleh penulis, 16 September 2016.

keberhasilan lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam membina

narapidana *concurus*, berikut kutipan wawancaranya :

Peneliti : Bagaimana tingkat keberhasilan lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam membina narapidana perbarengan tindak pidana(*concurus*)?

Muh. Hamka : jadi tolak ukur keberhasilan lapas itu sebenarnya tidak bisa di ukur oleh pihak lapas sendiri harus ada pihak dari eksternal yang mengukur menilai karena itu akan tidak objektif kalau lapas sendiri yang menilai dirinya, hanya indikator kami itu sederhana, ketika berjalannya semua program mereka mengikuti dengan baik hasilnya itu berhasil, seperti anak itu tidak mampu membaca, maka kita memfasilitasi dia untuk belajar membacadan mereka bisa membaca berarti itu satu indikator berhasil, kemudian yang kedua ketika mereka tidak tau dalam mempraktekkan ibadah, kemudian kita memberikan program praktek ibadah dan mereka sudah tau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing maka indikator kedua terpenuhi berhasil tetapi ketika mereka mengulang kembali perbuatannya itu bukan indikator keberhasilan yang harus dicapai oleh lapas tetapi harus diwujudkan bersama baik pihak lapas, pemerintah, masyarakat, dan semua lembaga sosial yang ada bahkan dunia pendidikan pun harus terlibat untuk mewujudkan mereka ini bisa menjadi yang lebih baik.¹²

Kutipan wawancara 6



¹²Andi Muh. Hamka, Staf Bimbingan Kemasyarakatan Klas 1 makassar, wawancara oleh penulis, 25 November 2016.

BAB V

PENUTUP

Setelah uraian dan pembahasan panjang yang telah dikemukakan dalam membahas penelitian ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan ini sebagai akhir dari penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pencurian dan Penganiayaan yaitu : a. Faktor lingkungan dimana pelaku bergaul sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya, b. Faktor Pendidikan; minimnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku juga menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan di masyarakat, c. Faktor Ekonomi; kebutuhan hidup dan tekanan ekonomi yang sangat sulit mendesak pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.
2. Upaya penanggulangan pelaku Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu : a. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri, b. Pembinaan Keagamaan; agama merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun pada hal-hal yang positif. Fenomena yang terjadi sekarang ini

banyaknya manusia yang tidak lagi menerapkan nilai agama dalam kehidupannya sehingga menimbulkan ketidak tentraman dan ketidak nyamanan bagi masyarakat. Adapun perbedaan pembinaan antara narapidana *concurus* dengan narapidana yang lainnya tidak ada perbedaan karena terbatasnya tenaga petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan serta tingkat keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana *concurus* tidak bisa diukur oleh pihak lembaga pemasyarakatan sendiri karena itu tidak objektif kalau pihak lapas yang menilai dirinya harus ada pihak dari eksternal yang mengukur dan menilai.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran-saran penulis yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali narapidana terhadap lingkungan yang akan dihadapinya pada saat selesai menjalani masa pidananya, maka dari itu Lapas hendaknya memberikan dan memaksimalkan pembinaan terkhusus pada pembinaan di bidang ekonomi. Karena rata-rata narapidana lapas melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dengan adanya pembinaan di bidang ekonomi para mantan narapidana tidak kembali lagi melakukan kejahatan. Dengan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Dalam hal melakukan pembinaan terhadap narapidana, Lapas kiranya dapat memisahkan pembinaan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak dikarenakan selama ini Lapas Klas I Makassar sejatinya merupakan Lapas yang diperuntukan bagi Narapidana Dewasa namun karena belum adanya Lembaga khusus pembinaan anak maka narapidana anak menjalani pembinaan juga Lapas Klas I Makassar, memang

narapidana anak memiliki blok tersendiri tetapi blok tersebut dapat diakses langsung oleh narapidana dewasa sehingga menyebabkan narapidana anak rawan bersosialisasi dengan narapidana dewasa dimana dapat terjadi narapidana anak dapat ilmu kejahatan baru dari narapidana dewasa, sehingga secara sederhana dapat dibahasakan bahwa narapidana dewasa dapat menularkan penyakit kejahatnnya terhadap narapidana anak.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 1 9 0 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 11577/S.01P/P2T/08/2016

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Prov. Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2866/2016 tanggal 09 Agustus 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ASMIR RESKianto**
Nomor Pokok : 10300112045
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSES) PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Agustus s/d 22 Oktober 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 18 Agustus 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal





KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.102 Makassar

Telepon : 0411-854731 Faximile : 0411-871160

Email:kepegawaiankanwilsulsel@yahoo.co.id

Nomor : W.23.UM.01.01-333
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

22 Agustus 2016

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
di - Makassar

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 11577/S.01P/P2T/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Asmir Reskianto
Nomor Pokok : 1030012045
Program Studi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jln. H. M Yasin Limpo No.36, Gowa

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk menyusun Skripsi dengan judul " **PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSES) PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR** ", yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus 2016 s/d 22 Oktober 2016, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan, atas perkenaananya diucapkan terimah kasih

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b. Kepala Bagian Umum

Mulyadi Arfah, SH, MH
NIP.19641229 199203 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
5. Peringgal.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin No.191 Telp. (0411) 868547 Fax (0411) 868275 Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W23.E1.UM.01.02 -265 /2016

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Asmir Reskianto
N I M	: 10300112045
Program Studi	: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jln. H.M Yasin Limpo No.36, Gowa

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tanggal 22 Agustus 2016 s/d 22 Oktober 2016 dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul : "**PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 November 2016

KEPALA



Drs. Marisidin Siregar Bc, IP, MH
NIP. 19640425 19901 1 001





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Asmir Reskianto dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 01 September 1994, penulis anak ke 2 dari 4 bersaudara yang terlahir dari buah kasih sayang seorang ayah bernama **Drs. Baso Padewakang** dan ibu bernama **Hj. ST. Salmah, SE** yang berasal dari Dusun Jombe Selatan Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Tetebatu I (2000-2006) dan melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa, setahun kemudian tepatnya tahun 2007 penulis pindah sekolah dengan alasan mengikuti orang tua di SMP Negeri I Binamu Kabupaten Jeneponto (2007-2009) dan lanjut pada sekolah menengah atas di SMA Negeri I Binamu (2009-2012).

Setelah lulus dari SMA Negeri I Binamu pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 06 Desember 2016 penulis akhirnya menyelesaikan jenjang pendidikan di UIN Alauddin Makassar dengan predikat memuaskan.